DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

Edisi Rabu, 21 Mei 2025

RINGKASAN BERITA HARI INI

Komisi D DPRD Sidoarjo Hearing Bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Dorong Penyaluran Bosda Berkeadilan

Sidoarjo - HARIAN BANGSA

Komisi D DPRD Sidoarjo meminta penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) berjalan efektif dan mendorong penyalurannya menerapkan prinsip berkeadilan.

Penegasan itu disampaikan pimpinan dan anggota Komisi D DPRD Sidoarjo saat menggelar rapat dengar pendapat (hearing) bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) di Gedung DPRD Sidoarjo, Rabu, 14 Mei 2025.

Wakil Ketua Komisi D Bangun Winarso mengatakan, belum ada azas keadilan dalam penyaluran dana BOSDA. Sebab masih ada perbedaan antara sekolah negeri dan swasta. Ia pun memberikan contoh dan gambaran soal ketimpangan tersebut.

Menurut politisi PAN ini, ada sekolah swasta yang besaran SPP (sumbangan pembinaan pendidikan) di atas ratusan ribu dengan jumlah siswa banyak. Dan sekolah swasta ini masih menerima dana BOSDA.

Sedangkan sekolah negeri yang memiliki jumlah siswa sedikit, tentu saja dana BOSDA yang diterima jumlahnya tidak banyak. Sementara di sisi lain, sekolah negeri dilarang memungut SPP.

"Dan sekolah negeri tidak akan bisa maju karena tidak bisa menarik SPP dan itu memang dilarang. Harusnya ada ada keadilan pada penyaluran dana BOSDA ini," tandas politisi asal Kecamatan Krian ini.

Bangun menyebut, tahun 2025 ini, Dana BOSDA dianggarkan sebesar Rp 161 Miliar. Pihaknya berharap penyaluran dana BOSDA tersebut bisa bermanfaat dan penyalurannya berazas berkeadilan.

"Kami berharap BOSDA bisa tepat sasaran dan berkeadilan dalam penyalurannya. Kalau bisa dialihkan untuk bantuan lain agar setiap sekolah bisa berlomba-lomba menaikkan prestasi dan keunggulannya masing-masing," pinta Bangun.

Anggota Komisi D Usman menyampaikan permasalahan penggunaan dana BOSDA yang tidak bisa dimanfaatkan untuk pembangunan fisik oleh sekolah penerima. Ia memberi contoh kejadian di SMPN 2 Sedati yang diminta oleh pemerintah desa untuk membongkar jembatan karena normalisasi sungai.

BAHAS BOSDA: Hearing Komisi D DPRD Sidoarjo bersama Dinas Dikbud membahas dana BOSDA, Rabu,14 Mei 2025. foto: mustain/ Harian BANGSA

"Tetapi karena tidak ada dana untuk pembongkaran itu, otomatis sekolah menjadi kebingungan. Karena itu, saya berharap ada terobosan baru dari penggunaan dana BOSDA ini agar bisa dimanfaatkan untuk penggunaan lainnya," cetus Usman.

Anggota Komisi D DPRD Sidoarjo lainnya, Fitrotin Hasanah berharap penyaluran dana BOSDA secara proporsional. Politisi PPP ini meminta dana BOSDA bisa untuk sekolah swasta yang dinilai sudah mapan. Namun diberikan dengan konsep pembagian yang proposional.

Saat hearing, juga terungkap alokasi dana BOSDA dan besaran penyerapannya. Pada tahun 2023, dana BOSDA dianggarkan Rp 161 miliar dan terserap Rp 154 miliar.

Tahun 2024 dianggarkan Rp 157 Miliar dan terserap 152 miliar. Pada tahun 2025 dianggarkan Rp 157 Miliar dan tersalurkan Rp 153 miliar. Dengan data itu, terdapat sisa dana yang tidak terserap denhan nilai cukup besar, mencapai miliaran rupiah.

Ketua Komisi D M Dhamroni Chudlori pun meminta adanya evaluasi penyaluran dan pemanfaatan dana BOSDA. Ia menegaskan, harus ada evaluasi sistem penyaluran agar pemanfaatannya bisa lebih tepat sasaran dan tidak ada sisa anggaran yang cukup besar nilainya.

"Kelebihan dana BOSDA ini bisa disisipkan untuk pembangunan sekolah atau pemberian insentif guru misalnya. Itu akan jauh lebih bermanfaat daripada ada sisa setiap tahun seperti sekarang ini," tandas politisi PKB ini.

Dalam hearing yang dipimpin Ketua Komisi D, M Damroni Chudlori ini, mayoritas anggota Komisi D hadir. Yakni Usman (PKB), Pujiono (PKB), Sutadji (PKB), Kasipah (PDIP), Irda Bella (Gerindra), Pratama Yudiarso (Gerindra) Wahyu Lumaksono (Golkar) dan Fitrotin Hasanah (PPP).

Sementara Kepala Dikbud Sidoarjo, Tirto Adi sepakat dengan masukan dari Komisi D terkait penyaluran dana BOSDA. Tirto menegaskan, azas keadilan tidak harus sama dan pihaknya berani mengambil sikap dan keputusan itu. Ia menyebut, keadilan itu ada keadilan distributif dan keadilan komulatif.

"Selama ini penyaluran BOSDA diterapkan dengan keadilan distributif. Tetapi kalau digeser distributif ke komulatif maka ini perbaruan. Kami pun sepakat untuk diubah," tandas Tirto Adi. **(adv/sta)**

Sidak Sekolah Rusak, Bupati Subandi Janji Segera Lakukan Perbaikan

SIDOARJO (BM) - Bupati Sidoarjo, Subandi melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke SMP Negeri 3 Porong, Sabtu (17/5). Kunjungan ini menyusul adanya laporan terkait rusaknya salah satu kelas akibat hujan deras dan angin kencang yang terjadi beberapa pekan lalu.

Dalam sidak itu, Subandi meninjau langsung kondisi bangunan yang rusak dan berjanji akan segera mengambil langkah perbaikan terhadap sejumlah kerusakan di sekolah itu.

Di SMPN 3 Porong, Subandi mengecek kerusakan atap kelas yang berada di lantai dua gedung sekolah yang mulai jebol dan ambrol. Subandi menyatakan bakal segera berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemkab Sidoarjo untuk mempercepat proses renovasi.

"Saya meninjau kerusakan kelas yang berada di lantai 2. Kita akan segera koordinasikan dengan Dinas Pendidikan untuk merenovasi atap kelas yang mulai lapuk, mengganti beberapa meja dan kursi kelas yang tidak layak lagi. Termasuk, memperbaiki kamar mandi yang tidak berfungsi demi kenyamanan kegiatan belajar mengajar," ujar Subandi.

Lebih jauh, Subandi menguraikan dana perbaikan akan dialokasikan melalui Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) Tahun 2025 ini. Menurutnya, efisiensi anggaran dilakukan agar fokus pembangunan bisa lebih besar pada sektor pendidikan.

"Dana perbaikan akan kita ambilkan dari PAK. Pemkab Sidoarjo telah melakukan efisiensi anggaran dan hasil efisiensi bakal digunakan untuk peningkatan mutu pendidikan," tegas mantan Kades Pabean, Kecamatan Sedati ini.

Sementara Kepala SMPN 3 Porong, Amalia menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas respon cepat dari Bupati Sidoarjo itu. Dia berharap proses perbaikan bangunan sekolah itu dapat segera dimulai. Harapannya, agar proses belajar dan mengajar bisa kembali berjalan normal.

"Saya bersyukur dan terima kasih kepada Bupati Sidoarjo karena membantu sekolah kami melakukan perbaikan gedung kelas yang rusak bersamaan hujan deras dan angin kencang beberapa hari lalu. Semoga renovasi dapat segera dilakukan agar siswa dan siswi dapat belajar dengan nyaman dan aman," tandasnya. **(udi)**

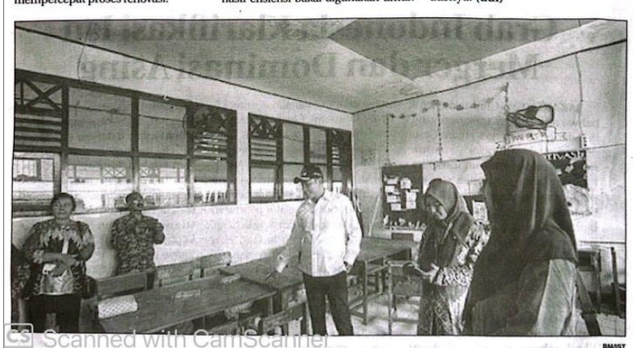

BM/ST

SIDAK: Bupati Sidoarjo, Subandi melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke SMP Negeri 3 Porong yang bangunan atapnya jebol, kamar mandi dan WC rusak serta bangku yang sudah tidak layak pakai, Sabtu (17/5).

Scanned with CamScanner

M SAIFUL ROHMAN/RADAR SIDOARJO

MEMANTAU: Tim dari DLHK Sidoarjo saat meninjau aktivitas produksi tahu di Desa Tropodo.

Kementerian Lingkungan Hidup Tinjau Dugaan Pencemaran di Desa Tropodo

KRIAN-Direktorat Pengendalian Pencemaran Air Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) turun langsung ke Desa Tropodo, Kecamatan Krian, untuk meninjau aktivitas produksi tahu. Langkah ini dilakukan sebagai respons atas laporan dugaan pencemaran udara dan limbah yang telah sampai ke tingkat pusat.

Trino Ardi, perwakilan dari KLHK, menjelaskan bahwa pengawasan tidak hanya difokuskan pada penggunaan bahan bakar berbasis sampah plastik, tetapi juga pada pengelolaan limbah produksi tahu, terutama limbah kedelai.

"Kami tidak hanya memantau bahan bakar dari sampah, tetapi juga limbah kedelainya. Intinya, pengawasan kami menyeluruh," ujarnya saat ditemui Radar Sidoarjo, Selasa (20/5).

Trino menyebutkan bahwa pimpinan KLHK di pusat telah menerima laporan awal terkait dugaan pencemaran udara dari kegiatan industri rumahan di kawasan tersebut. Oleh karena itu, tim KLHK diturunkan untuk melakukan verifikasi langsung di lapangan.

"Hari ini kami lakukan pengecekan langsung. Tindak lanjutnya akan diputuskan oleh pimpinan kami di pusat," tambahnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Sidoarjo, Bahrul Amig, menyampaikan bahwa pihaknya telah menyiapkan

● Ke Halaman 10

INFO MEDIA PERS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Sidak Sekolah Rusak, Bupati Subandi Janji Segera Lakukan Perbaikan

SIDOARJO (BM) - Bupati Sidoarjo, Subandi melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke SMP Negeri 3 Porong, Sabtu (17/5). Kunjungan ini menyusul adanya laporan terkait rusaknya salah satu kelas akibat hujan deras dan angin kencang yang terjadi beberapa pekan lalu.

Dalam sidak itu, Subandi meninjau langsung kondisi bangunan yang rusak dan berjanji akan segera mengambil langkah perbaikan terhadap sejumlah kerusakan di sekolah itu.

Di SMPN 3 Porong, Subandi mengecek kerusakan atap kelas yang berada di lantai dua gedung sekolah yang mulai jebol dan ambrol. Subandi menyatakan bakal segera berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemkab Sidoarjo untuk mempercepat proses renovasi.

"Saya meninjau kerusakan kelas yang berada di lantai 2. Kita akan segera koordinasikan dengan Dinas Pendidikan untuk merenovasi atap kelas yang mulai lapuk, mengganti beberapa meja dan kursi kelas yang tidak layak lagi. Termasuk, memperbaiki kamar mandi yang tidak berfungsi demi kenyamanan kegiatan belajar mengajar," ujar Subandi.

Lebih jauh, Subandi menguraikan dana perbaikan akan dialokasikan melalui Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) Tahun 2025 ini. Menurutnya, efisiensi anggaran dilakukan agar fokus pembangunan bisa lebih besar pada sektor pendidikan.

"Dana perbaikan akan kita ambilkan dari PAK. Pemkab Sidoarjo telah melakukan efisiensi anggaran dan hasil efisiensi bakal digunakan untuk peningkatan mutu pendidikan," tegas mantan Kades Pabean, Kecamatan Sedati ini.

Sementara Kepala SMPN 3 Porong, Amalia menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas respon cepat dari Bupati Sidoarjo itu. Dia berharap proses perbaikan bangunan sekolah itu dapat segera dimulai. Harapannya, agar proses belajar dan mengajar bisa kembali berjalan normal.

"Saya bersyukur dan terima kasih kepada Bupati Sidoarjo karena membantu sekolah kami melakukan perbaikan gedung kelas yang rusak bersamaan hujan deras dan angin kencang beberapa hari lalu. Semoga renovasi dapat segera dilakukan agar siswa dan siswi dapat belajar dengan nyaman dan aman," tandasnya. **(udi)**

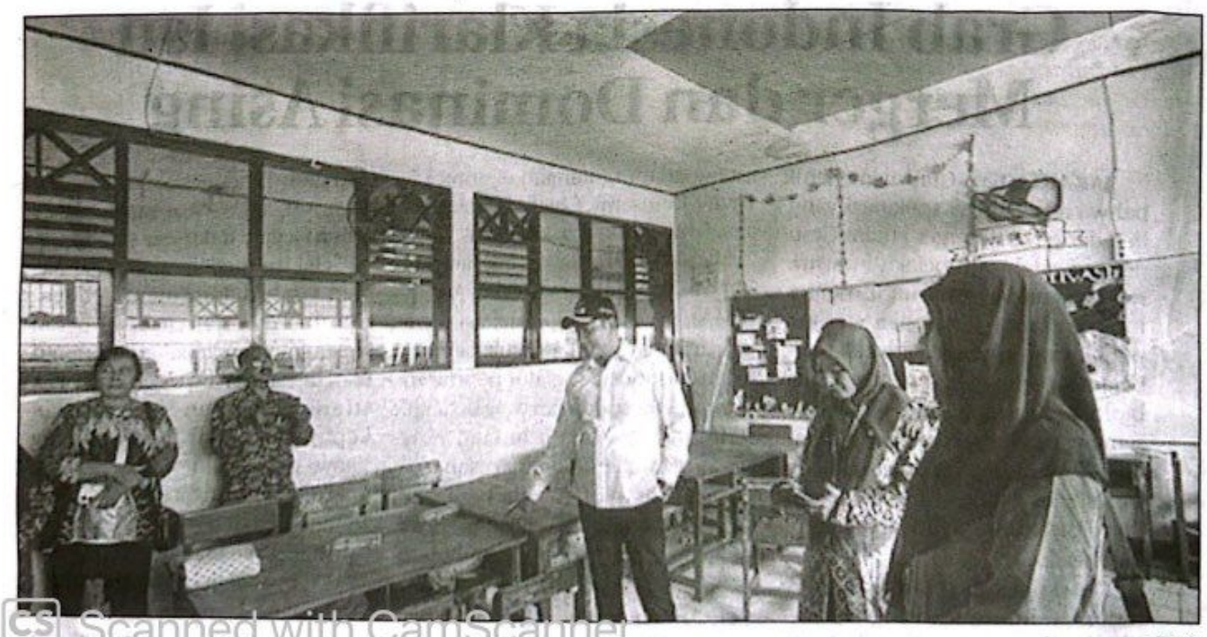

Scanned with CamScanner

BM/ST

SIDAK: Bupati Sidoarjo, Subandi melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke SMP Negeri 3 Porong yang bangunan atapnya jebol, kamar mandi dan WC rusak serta bangku yang sudah tidak layak pakai, Sabtu (17/5).

THE JUSTICE NEWSPAPER'S LEADER
Berita Metro

BM/ST

AUDENSI: Bupati Sidoarjo, Subandi menggelar audiensi bersama Koalisi Perkumpulan Penyandang Disabilitas Kabupaten Sidoarjo.

Pemkab Dorong Inklusi Disabilitas Lewat Ranperda dan Lapangan Kerja

SIDOARJO (BM) - Pemeritah Kabupaten (Pemkab) terus melakukan berbagai upaya untuk mendorong inklusi disabilitas. Salah satunya, dengan mendoring lewat ranperda dan menciptakan lapangan kerja khusus disabilitas.

Bupati Sidoarjo, H. Subandi, mengungkakan hal itu saat menggelar audiensi bersama Koalisi Perkumpulan Penyandang Disabilitas Kabupaten Sidoarjo di Pendopo Kabupaten, akhir pekan lalu. "Mereka bersertifikasi dan profesional, kita harus memberikan wadah bagi mereka." katanya.

Dalam pertemuan yang juga dihadiri oleh Kepala Dinas Sosial dan perwakilan organisasi disabilitas tersebut, Subandi menyampaikan komitmen pemerintah daerah untuk mempercepat pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyandang Disabilitas.

Ranperda ini dirancang untuk memberikan payung hukum yang kuat bagi penyandang disabilitas, guna menjamin inklusi sosial dan akses terhadap layanan publik serta peluang kerja.

Menurut Subandi, pemerintah akan memetakan para penyandang disabilitas yang memiliki keahlian atau sertifikasi di bidang tertentu, khususnya layanan kesehatan. Mereka akan diarahkan untuk bisa bekerja di dua RSUD dan 30 Puskesmas di Sidoarjo.

"Kita akan diskusikan lebih lanjut dengan OPD terkait agar mereka bisa ditempatkan bekerja di fasilitas kesehatan yang kita miliki sebagai bentuk pelayanan masyarakat," ujar Subandi.

Langkah tersebut diapresiasi sebagai bentuk nyata dari pemberdayaan penyandang disabilitas, tidak hanya sebagai simbol kesetaraan, namun juga sebagai solusi nyata peningkatan kualitas layanan publik yang inklusif.

Audiensi ini juga membahas pentingnya pelibatan komunitas disabilitas dalam proses penyusunan kebijakan daerah. Pemkab Sidoarjo berkomitmen menjadikan penyandang disabilitas sebagai mitra aktif dalam perencanaan dan implementasi pembangunan.

Ketua Koalisi Disabilitas Sidoarjo, Abdul Majid, menyatakan optimisme terhadap langkah pemerintah ini. Ia menilai keterlibatan langsung dalam proses kebijakan akan menciptakan keadilan dan kesetaraan yang lebih nyata.

"Saya menyambut baik dan berterima kasih atas langkah-langkah yang telah diambil oleh Bupati Sidoarjo. Kami berharap, ini menjadi titik awal kesetaraan hak dan perlindungan yang berkelanjutan bagi kaum disabilitas," ucap Majid.

Melalui forum tersebut, Pemkab Sidoarjo menegaskan tekadnya untuk mendorong perubahan paradigma dalam tata kelola pemerintahan yang lebih adil, setara, dan berpihak pada kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas. **(udi)**

CS Scanned with CamScanner

THE JUSTICE NEWSPAPER'S LEADER
Berita Metro

INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Komisi D DPRD Sidoarjo Hearing Bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Dorong Penyaluran Bosda Berkeadilan

Sidoarjo - HARIAN BANGSA

Komisi D DPRD Sidoarjo meminta penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) berjalan efektif dan mendorong penyalurannya menerapkan prinsip berkeadilan.

Penegasan itu disampaikan pimpinan dan anggota Komisi D DPRD Sidoarjo saat menggelar rapat dengar pendapat (hearing) bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) di Gedung DPRD Sidoarjo, Rabu, 14 Mei 2025.

Wakil Ketua Komisi D Bangun Winarso mengatakan, belum ada azas keadilan dalam penyaluran dana BOSDA. Sebab masih ada perbedaan antara sekolah negeri dan swasta. Ia pun memberikan contoh dan gambaran soal ketimpangan tersebut.

Menurut politisi PAN ini, ada sekolah swasta yang besaran SPP (sumbangan pembinaan pendidikan) di atas ratusan ribu dengan jumlah siswa banyak. Dan sekolah swasta ini masih menerima dana BOSDA.

Sedangkan sekolah negeri yang memiliki jumlah siswa sedikit, tentu saja dana BOSDA yang diterima jumlahnya tidak banyak. Sementara di sisi lain, sekolah negeri dilarang memungut SPP.

"Dan sekolah negeri tidak akan bisa maju karena tidak bisa menarik SPP dan itu memang dilarang. Harusnya ada ada keadilan pada penyaluran dana BOSDA ini," tandas politisi asal Kecamatan Krian ini.

Bangun menyebut, tahun 2025 ini, Dana BOSDA dianggarkan sebesar Rp 161 Miliar. Pihaknya berharap penyaluran dana BOSDA tersebut bisa bermanfaat dan penyalurannya berazas berkeadilan.

"Kami berharap BOSDA bisa tepat sasaran dan berkeadilan dalam penyalurannya. Kalau bisa dialihkan untuk bantuan lain agar setiap sekolah bisa berlomba-lomba menaikkan prestasi dan keunggulannya masing-masing," pinta Bangun.

Anggota Komisi D Usman menyampaikan permasalahan penggunaan dana BOSDA yang tidak bisa dimanfaatkan untuk pembangunan fisik oleh sekolah penerima. Ia memberi contoh kejadian di SMPN 2 Sedati yang diminta oleh pemerintah desa untuk membongkar jembatan karena normalisasi sungai.

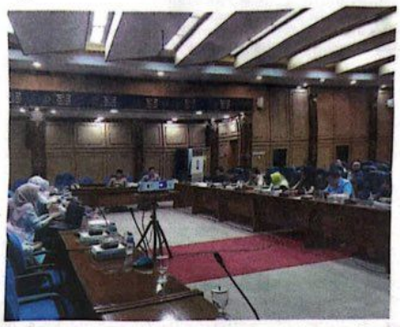

BAHAS BOSDA: Hearing Komisi D DPRD Sidoarjo bersama Dinas Dikbud membahas dana BOSDA, Rabu,14 Mei 2025. foto: mustain/ Harian BANGSA

"Tetapi karena tidak ada dana untuk pembongkaran itu, otomatis sekolah menjadi kebingungan. Karena itu, saya berharap ada terobosan baru dari penggunaan dana BOSDA ini agar bisa dimanfaatkan untuk penggunaan lainnya," cetus Usman.

Anggota Komisi D DPRD Sidoarjo lainnya, Fitrotin Hasanah berharap penyaluran dana BOSDA secara proporsional. Politisi PPP ini meminta dana BOSDA bisa untuk sekolah swasta yang dinilai sudah mapan. Namun diberikan dengan konsep pembagian yang proposional.

Saat hearing, juga terungkap alokasi dana BOSDA dan besaran penyerapannya. Pada tahun 2023, dana BOSDA dianggarkan Rp 161 miliar dan terserap Rp 154 miliar.

Tahun 2024 dianggarkan Rp 157 Miliar dan terserap 152 miliar. Pada tahun 2025 dianggarkan Rp 157 Miliar dan tersalurkan Rp 153 miliar. Dengan data itu, terdapat sisa dana yang tidak terserap dengan nilai cukup besar, mencapai miliaran rupiah.

Ketua Komisi D M Dhamroni Chudlori pun meminta adanya evaluasi penyaluran dan pemanfaatan dana BOSDA. Ia menegaskan, harus ada evaluasi sistem penyaluran agar pemanfaatannya bisa lebih tepat sasaran dan tidak ada sisa anggaran yang cukup besar nilainya.

"Kelebihan dana BOSDA ini bisa disisipkan untuk pembangunan sekolah atau pemberian insentif guru misalnya. Itu akan jauh lebih bermanfaat daripada ada sisa setiap tahun seperti sekarang ini," tandas politisi PKB ini.

Dalam hearing yang dipimpin Ketua Komisi D, M Damroni Chudlori ini, mayoritas anggota Komisi D hadir. Yakni Usman (PKB), Pujiono (PKB), Sutadji (PKB), Kasipah (PDIP), Irda Bella (Gerindra), Pratama Yudiarso (Gerindra) Wahyu Lumaksono (Golkar) dan Fitrotin Hasanah (PPP).

Sementara Kepala Dikbud Sidoarjo, Tirto Adi sepakat dengan masukan dari Komisi D terkait penyaluran dana BOSDA. Tirto menegaskan, azas keadilan tidak harus sama dan pihaknya berani mengambil sikap dan keputusan itu. Ia menyebut, keadilan itu ada keadilan distributif dan keadilan komulatif.

"Selama ini penyaluran BOSDA diterapkan dengan keadilan distributif. Tetapi kalau digeser distributif ke komulatif maka ini perbaruan. Kami pun sepakat untuk diubah," tandas Tirto Adi. **(adv/sta)**

Scanned with CamScanner

HARIAN BANGSA
Koran Warga Jatim

DLHK Sidoarjo Sanksi bagi Pembuang Sampah

Sidoarjo – HARIAN BANGSA

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Sidoarjo menjatuhkan sanksi sosial kepada empat orang yang ketahuan membuang sampah sembarangan di kawasan Bypass Juanda, Desa Sedati Gede. Terhadap keempat orang yang tertangkap basah itu, DLHK langsung meminta mereka melakukan sesuatu.

"Keempatnya langsung kami *bawa ke balai desa untuk dilakukan pemeriksaan. Setelah itu mereka dikenai sanksi sosial berupa menyapu dan membersihkan sampah yang mereka buang,"* ujar Hajid, Kepala UPTD TPA Griyo Mulyo Jabon, Selasa (20/5/2025).

Dia menjelaskan, aksi buang sampah tidak pada tempatnya itu ketahuan saat sejumlah petugas DLHK Sidoarjo melaksanakan Operasi Penertiban Sampah Liar yang digelar 17-19 Mei 2025.

Dipastikan bahwa keempat pelaku berasal dari luar wilayah Sedati Gede. Satu orang diketahui merupakan warga Desa Brebek, Kecamatan Waru, 1 lainnya dari Desa Kepuhkiriman, Kecamatan Waru, sedangkan 2 sisanya adalah pemilik usaha di sekitar Sedati Gede.

DLHK Sidoarjo sebelumnya telah menggelar kerja bakti bersama Kecamatan Sedati dan Pemdes Sedati Gede untuk membersihkan lokasi sedia yang biasa menjadi sasaran pembuangan sampah liar.

Empat orang yang ketahuan buang sampah sembarangan langsung dikenai sanksi sosial.

"Setelah itu dipasang banner larangan disertai ancaman denda maksimal Rp50 juta sesuai Pasal 25 dan 63 Perda Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga," jelas Hajid.

"Sayangnya, meski sudah dipasang banner masih saja ada warga yang nekat buang sampah. Ini sudah keterlaluan. Karena itu kami ambil langkah tegas dengan sanksi sosial agar ada efek jera," imbuh Hajid.

Hajid menambahkan, pihaknya masih mengedepankan pendekatan persuasif berupa pembinaan. Namun jika pelanggaran terus berulang tidak menutup kemungkinan sanksi denda sesuai Perda akan diberlakukan.

"*Kami imbau masyarakat untuk patuh dan peduli terhadap kebersihan lingkungan. Jangan sampai tindakan kecil seperti ini berujung pada konsekuensi hukum yang lebih berat," pungkasnya.* ***(md/rus)***

Scanned with CamScanner

HARIAN BANGSA
Koran Warga Jatim

INFO MEDIA PERS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

FOTO-FOTO PEMKAB SIDOARJO

SEBATANG KARA: Wabup Sidoarjo Mimik Idayana (kiri) mengunjungi Tasripan yang tinggal di gubuk pinggir tanggul lumpur kemarin (20/5). Dia sehari-hari hanya memungut barang bekas.

Bertahun-tahun Lansia Hidup di Gubuk Dekat Tanggul Lumpur

Wabup Bantu Sediakan Tempat Tinggal

TIDAK LAYAK: Gubuk tempat tinggal Tasripan dipenuhi barang-barang bekas.

SIDOARJO - Tasripan, lansia terdampak lumpur Porong, bertahun-tahun tinggal di gubuk tak layak huni di Desa Ketapang, Tanggulangin. Melihat kondisi itu, Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana mengajak tinggal di tempat yang lebih layak.

Kemarin (20/5), Mimik mengunjungi gubuk milik Tasripan. Lokasinya dekat dengan tanggul lumpur. Sehari-hari, pria berusia 77 tahun itu hidup dengan memungut botol bekas dan barang rongsok lainnya untuk dijual.

"Saya merasa ini adalah tanggung jawab kami sebagai pemerintah daerah, beliau juga tinggal sebatang kara di gubuk ini," katanya kemarin (20/5). Mimik mengatakan, Pemkab Sidoarjo bersama Baznas Sidoarjo akan membantu meringankan beban Tasripan.

"Penghasilannya yang minim hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari," imbuhnya. Dalam kunjungan tersebut, Mimik juga memberikan bantuan sembako dan peralatan kebutuhan sehari-hari.

Pemkab akan mencarikan tempat tinggal yang lebih layak lagi untuk Tasripan. "Mbah Tasripan bersedia untuk pindah sementara. Untuk kebutuhan sehari-harinya akan saya tanggung," katanya. **(eza/uzi)**

Jawa Pos

PENGUJIAN: Petugas dari Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) Kementerian Lingkungan Hidup mengecek limbah air pabrik tahu Tropodo, Krian, Sidoarjo, kemarin (20/5).

Petugas dari Kementerian Lingkungan Hidup Ambil Sampel Udara dan Air

Diduga Ada Limbah Tahu di T[illegible]do yang Dibuang ke Sungai

Scanned with CamScanner

SIDOARJO – Petugas dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mengambil sampel udara dan air di sekitar industri kecil menengah (IKM) tahu di Dusun Kiagen, Desa Tropodo, Krian, kemarin (20/5). Tim dari Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (Dirjen PPKL) KLH itu melakukan survey dan sampling kondisi lingkungan di sentra industri tahu. Ketua Tim Pengendali Dampak Lingkungan Dirjen PPKL Trino Adi mengatakan, pihaknya melihat kondisi terkini penggunaan sampah plastik dan bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagai bahan bakar di sejumlah sentra produksi di Sidoarjo.

Baca Petugas... Hal 19

Jawa Pos

Petugas dari Kementerian Lingkungan Hidup Ambil Sampel Udara dan Air

Sambungan dari hal 13

"Kami mau lihat langsung kondisi di lapangan. Juga bertanya dengan kades dan pelaku usaha," katanya kemarin (20/5).

Tim dari PPKL terdiri dari dua tim, yakni bagian pengendalian pencemaran air dan pengendalian pencemaran udara. Petugas mengambil sampel terkait limbah air dan emisi udara. Diduga ada limbah yang dibuang ke sungai.

"Kami coba cari tahu problemnya apa yang pakai sampah, karena kata DLHK juga ada sebenarnya yang menggunakan kayu sebagai bahan bakar," paparnya. Tim Dirjen PPKL sudah sempat survey pada Senin (20/5).

Peralihan Bahan Bakar

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Sidoarjo Bahrul Amig menyampaikan bahwa pihaknya telah menyiapkan langkah-langkah jangka menengah dan panjang terkait peralihan bahan bakar. "Rencana kami sudah kami sampaikan ke tim dari KLH. Nantinya akan dirumuskan pergeseran bahan bakarnya seperti apa," katanya. Alternatifnya adalah kayu dan gas dari PGN. **(eza/jun)**

Scanned with CamScanner

Jawa Pos

Driver Ojol Desak Revisi Tarif dan Potongan Aplikasi

Gelar Demo Serentak di Jakarta-Surabaya

JAKARTA – Ribuan *driver* ojek *online* (ojol) menggelar aksi unjuk rasa di beberapa kota kemarin (20/5). Di Jakarta, mereka mendatangi sejumlah titik. Antara lain kantor Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Istana Merdeka, depan gedung DPR, kantor-kantor aplikasi, dan semua lokasi yang berhubungan dengan perusahaan aplikasi.

Para *driver* transportasi daring itu mengajukan sejumlah tuntutan.

Baca ***Driver...*** *Hal 2*

SALMAN TOYIBI/JAWA POS

OFF BID: Pengemudi ojek online (ojol) berunjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta, kemarin (20/5). Aksi serupa dilakukan di Surabaya, Jawa Timur.

Jawa Pos

INFO MEDIA PERS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Driver Ojol Desak Revisi Tarif dan Potongan Aplikasi

Sambungan dari hal 1

Antara lain, meminta pemerintah menjatuhkan sanksi tegas kepada perusahaan aplikasi yang melanggar Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 dan Kepmenhub Nomor 1001 Tahun 2022.

Driver ojol juga mendesak Komisi V DPR menggelar rapat dengar pendapat (RDP) gabungan yang melibatkan Kemenhub, asosiasi pengemudi, dan pihak aplikator. Mereka menuntut agar potongan aplikasi maksimal hanya 10 persen.

Massa ojol juga meminta revisi tarif penumpang dan penghapusan program-program seperti aceng, slot, hemat, dan prioritas yang dinilai merugikan pengemudi. Mereka juga meminta tarif layanan makanan dan pengiriman barang ditetapkan secara adil dengan melibatkan asosiasi pengemudi, regulator, aplikator, dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).

Aksi demo itu mendapat sambutan dari DPR. Komisi V DPR menyatakan akan mengundang aplikator dan perwakilan serikat pengemudi ojek *online* untuk RDP pada Senin (26/5). Salah satu agendanya adalah membahas penurunan potongan tarif sebesar 10 persen. "Kami sudah menangkap aspirasi teman-teman dan komisi V akan mengagendakan rapat dengar pendapat dengan ojol dan operator," kata Ketua Komisi V DPR Lasarus kemarin (20/5).

RIANA SETIAWAN/JAWA POS

LIMA TUNTUTAN: Para driver ojek online di depan Kantor Gubernur Jatim di Jalan Pahlawan, Surabaya, untuk menyampaikan aspirasi kemarin.

Pelanggaran Tarif di Jatim

Aksi demo juga terjadi di Surabaya, Jawa Timur. Menurut Juru Bicara Frontal (Front Driver Online Tolak Aplikator Nakal) Jatim Samuel Grandy, sejak SK gubernur Jawa Timur tentang tarif transportasi *online* diterbitkan pada 2023, tidak satu pun aplikator mematuhinya. "Tarif batas bawah sudah ditetapkan melalui SK gubernur. Tapi tidak ada yang menerapkannya," kata Samuel.

Kadishub Jatim Nyono membenarkan soal pelanggaran tarif dari aplikator. Itu didasarkan pada temuan *driver* sendiri. Menurut Nyono, seluruh aspirasi *driver* akan dirapatkan. "Sudah ada SK soal batas tarif. Namun, sanksinya belum diatur," kata Nyono. **(far/hen/oni)**

Scanned with CamScanner

Jawa Pos

Tiga Pilar Tulangan Periksa Hewan Kurban

Sidoarjo, Memorandum

Menjelang Hari Raya Iduladha 1446 Hijriah, pembelian hewan kurban di Kabupaten Sidoarjo mengalami peningkatan. Seiring dengan hal tersebut, peternak kambing dan sapi ditimbau untuk lebih memperhatikan kesehatan hewan serta kebersihan kandang.

Kesehatan hewan kurban yang dipelihara warga dipantau tiga pilar Tulangan.

Untuk memastikan kondisi hewan kurban tetap sehat dan layak jual, petugas gabungan dari Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan Sidoarjo, bersama TNI dan Polri, melakukan pengecekan langsung di kandang milik peternak kambing di Desa Janti, Kecamatan Tulangan, Selasa (20/5).

Bhabinkamtibmas Janti Aiptu H Agus Subiantoro menyampaikan, kegiatan ini merupakan bentuk kolaborasi tiga pilar dalam mendukung program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Khususnya di sektor ketahanan pangan.

"Kegiatan ini kami lakukan agar masyarakat mendapatkan hewan kurban yang sehat dan layak konsumsi, sekaligus menjaga kepercayaan terhadap peternak lokal," ujarnya di sela kegiatan.

Pemeriksaan tersebut meliputi kondisi fisik hewan, lingkungan kandang, serta pemberian edukasi kepada peternak tentang pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan hewan kurban.

Kapolresta Sidoarjo Kombespol Christian Tobing mengeluarkan imbauan kepada peternak hewan kurban. Isinya, agar selalu memperhatikan kondisi kesehatan dan kebersihan kandang. Sehingga perkembangan pun optimal, dan dapat meningkatkan swasembada pangan secara mandiri bagi masyarakat. **(kri/san/epe)**

Scanned with CamScanner

INFO MEDIA PERS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Betonisasi Ruas Jalan Gedangan-Betro Target Agustus Finish

Sidoarjo, Pojok Kiri,-

Proyek betonisasi terus berlanjut. Tahun 2025 ini ada 11 ruas jalan yang akan dibeton. Salah satunya betonisasi jalan Betro-Gedangan yang proyeknya sudah dimulai.

Targetnya pembangunan jalan beton dengan panjang 800 meter itu selesai bulan Agustus mendatang. Bupati *Sidoarjo Subandi memantau langsung proyek pembangunan jalan tersebut.*

"Melihat progresnya, pembangunan jalan ini sudah bagus. Kita terus awasi bersama, supaya semua sesuai spesifikasi dan target waktu yang telah ditentukan," kata Bupati Subandi saat sidak ke sana, Senin (19/5/2025).

Menurutnya, progres pengerjaan betonisasi jalan Betro-Gedangan cukup menggembirakan. Di tiga bulan pengerjaannya telah melebihi target yang ditetapkan. Ada surplus pengerjaannya sebesar 19 persen dari target yang ditetapkan sebesar 12 persen.

Subandi meminta pengawasan terhadap pengerjaan terus dilakukan. Dengan begitu proyek betonisasi jalan Betro-Gedangan selesai tepat waktu.

"Kontraknya 6 bulan, ini sudah berjalan 3 bulan dengan taiget 12 persen dan tercapai 31 persen. Mudah-mudahan dalam jangka waktu tiga bulan lagi pengerjaannya dapat selesai," harapnya.

Kepala Dinas PU Bina Marga dan SDA Sidoarjo Dwi Eko Saptono mengungkapkan, ada 11 ruas jalan yang akan dibeton tahun 2025 ini. Salah satunya proyek betonisasi lanjutan jalan Betro-Gedangan yang masih berjalan.

Selebihnya proyek betonisasi jalan tahun ini masih dalam tahap lelang. Diharapkan empat minggu kedepan sudah ada pemenangnya.

"Semoga empat minggu kedepan sudah ada pemenangnya dan tidak sampai terjadi lelang gagal sehingga waktu yang tersisa kurang lebih enam bulan ini dapat kami optimalkan karena rata-rata betonisasi yang kami lakukan itu ditarget antara empat sampai lima bulan," ucapnya.

Dwi mengatakan betonisasi jalan Betro-Gedangan dimulai dari frontage road Gedangan sampai Desa Ketajen Gedangan. Panjangnya 800 meter dengan lebar 7 meter. Saat ini progress jalan Betro-Gedangan masih pada pemasangan tiang cor penahan tanah tepi sungai.

Setelah itu selesai akan dilakukan pengerjaan betonisasi setebal 60 cm. Dimulai dengan pengerjaan Lapisan Pondasi Atas/LPA setebal 30 cm dan dilanjutkan pengerjaan rigid beton setebal 30 cm.

"Tiga bulan lagi inshaalloh dapat dicapai dengan baik kalau pekerjaan penahannya selesai semua karena pekerjaan rigid selanjutnya lebih cepat," ucapnya. **(Khol/Dy)**

Scanned with CamScanner

POJOK KIRI
KORAN RAKYAT

DIKEBUT: Proyek betonisasi ruas Gedangan-Sedati mulai dikerjakan. Proyek ini merupakan bagian dari persiapan pembangunan Flyover Gedangan.

M. SAIFUL ROHMAN/RADAR SIDOARJO

Betonisasi Ruas Jalan Gedangan-Sedati Dimulai, Terintegrasi dengan Flyover

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (DPUBM SDA) mulai melaksanakan proyek betonisasi jalan di ruas Gedangan–Sedati. Proyek ini merupakan bagian dari persiapan pembangunan Flyover Gedangan yang direncanakan mulai dikerjakan pada 2027.

M. Saiful Rohman, Wartawan Radar Sidoarjo

KEPALA DPUBM SDA Sidoarjo, Dwi Eko Saptono, menyampaikan bahwa proyek betonisasi ini merupakan bagian dari 11 ruas jalan prioritas yang akan dikerjakan pada tahun 2025.

"Awalnya hanya sembilan ruas yang direncanakan dibetonisasi. Namun kini bertambah dua ruas, yakni jalan Brigjen Katamso di Waru dan ruas Kalanganyar–Segorotambak di Banjarkemuning," ujarnya saat ditemui Radar Sidoarjo.

Untuk menghindari gangguan lalu lintas di siang hari, pengerjaan proyek akan dilaksanakan pada malam hari. Ruas Gedangan–Sedati menjadi prioritas karena akan langsung terhubung dengan Frontage Road sebagai akses utama dari dan ke kawasan simpang empat Gedangan.

FENOMENA

"Konsepnya terintegrasi. Jalan yang berada di bawah simpang empat Gedangan ini harus selesai lebih dulu, termasuk akses ke arah barat," jelas Dwi Eko.

Selain ruas Gedangan–Sedati, tahun depan juga akan dilakukan betonisasi pada ruas Gedangan–Masangan yang *memiliki panjang sekitar lima kilometer.*

Kedua proyek ini merupakan bagian dari persiapan besar pembangunan Flyover Gedangan.

"Jika jalan di bawahnya sudah dibeton dan rapi, maka saat flyover mulai dibangun tahun 2027 nanti, potensi kemacetan parah bisa diminimalisir," tambahnya. (sai/vga)

Scanned with CamScanner

INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

M SAIFUL ROHMAN/RADAR SIDOARJO

MEMANTAU: Tim dari DLHK Sidoarjo saat meninjau aktivitas produksi tahu di Desa Tropodo.

Kementerian Lingkungan Hidup Tinjau Dugaan Pencemaran di Desa Tropodo

KRIAN-Direktorat Pengendalian Pencemaran Air Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) turun langsung ke Desa Tropodo, Kecamatan Krian, untuk meninjau aktivitas produksi tahu. Langkah ini dilakukan sebagai respons atas laporan dugaan pencemaran udara dan limbah yang telah sampai ke tingkat pusat.

Trino Ardi, perwakilan dari KLHK, menjelaskan bahwa pengawasan tidak hanya difokuskan pada penggunaan bahan bakar berbasis sampah plastik, tetapi juga pada pengelolaan limbah produksi tahu, terutama limbah kedelai.

"Kami tidak hanya memantau bahan bakar dari sampah, tetapi juga limbah kedelainya. Intinya, pengawasan kami menyeluruh," ujarnya saat ditemui Radar Sidoarjo, Selasa (20/5).

Trino menyebutkan bahwa pimpinan KLHK di pusat telah menerima laporan awal terkait dugaan pencemaran udara dari kegiatan industri rumahan di kawasan tersebut. Oleh karena itu, tim KLHK diturunkan untuk melakukan verifikasi langsung di lapangan.

"Hari ini kami lakukan pengecekan langsung. Tindak lanjutnya akan diputuskan oleh pimpinan kami di pusat," tambahnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Sidoarjo, Bahrul Amig, menyampaikan bahwa pihaknya telah menyiapkan

● Ke Halaman 10

Radar Sidoarjo radarsidoarjo

Scanned with CamScanner

RADAR SIDOARJO.ID

Kementerian Lingkungan Hidup...

sejumlah langkah perbaikan terkait pengendalian pencemaran di Desa Tropodo. Salah satunya adalah masa transisi yang dimulai pada Rabu (21/5).

"Dua minggu ke depan akan menjadi masa transisi. Harapannya, wilayah ini bisa segera bebas dari polusi udara," ujarnya.

Menurut Amig, solusi jangka panjang adalah mendorong pelaku usaha tahu untuk beralih ke bahan bakar ramah lingkungan, seperti gas. Ia menambahkan bahwa proses ini akan dikolaborasikan bersama Pemprov Jawa Timur dan Pemkab Sidoarjo, melalui pengembangan jaringan gas dan pemanfaatan program Corporate Social Responsibility (CSR).

"Gubernur juga siap mendukung penyediaan bahan bakar yang lebih bersih dan aman bagi lingkungan pungkasnya. **(sai/vga)**

Scanned with CamScanner

RADAR SIDOARJO.ID

INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

IST

PEDULI: Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana sidak ke warga lanjut usia di Desa Ketapang, Kecamatan Tanggulangin.

Wabup Sidoarjo Sidak Gubuk Tak Layak Huni Milik Lansia di Tanggulangin

TANGGULANGIN-Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke tempat tinggal seorang warga lanjut usia yang hidup sebatang kara di gubuk tak layak huni, tepatnya di Desa Ketapang, Kecamatan Tanggulangin, Senin (19/5/2025).

Kunjungan tersebut dilakukan setelah Wabup menerima laporan dari masyarakat terkait kondisi gubuk yang berada tidak jauh dari tanggul Lumpur Lapindo.

Gubuk tersebut dihuni oleh Tasripan, seorang lansia yang hidup sendiri tanpa keluarga. Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, ia memungut botol bekas dan barang rongsokan yang kemudian dijual. Penghasilannya hanya cukup untuk makan sehari-hari.

Turut mendampingi dalam kunjungan tersebut, perwakilan dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Sidoarjo yang juga memberikan bantuan.

"Saya merasa ini adalah tanggung jawab kita sebagai pemerintah daerah bersama Baznas untuk membantu meringankan beban masyarakat kurang mampu di Sidoarjo," ujar Hj. Mimik Idayana.

Dalam kunjungan tersebut, Wabup memberikan bantuan sembako serta

● Ke Halaman 10

layouter: hadi

Diperbanyak oleh Subbag Persidangan, Risalah dan Humas Sekretariat DPRD Sidoarjo

Scanned with CamScanner

Wabup Sidoarjo Sidak...

peralatan kebutuhan sehari-hari kepada Tasriban. Tak hanya itu, Wabup Mimik juga menawarkan tempat tinggal yang lebih layak.

"Saya menawarkan fasilitas tempat tinggal di rumah kos milik saya. Alhamdulillah, Mbah Tasriban bersedia pindah. Untuk kebutuhan harianya akan saya tanggung agar beliau bisa hidup lebih tenang dan nyaman," tambannya.

Langkah cepat dan empati yang ditunjukkan Wakil Bupati Sidoarjo ini mendapat apresiasi dari warga sekitar. Mereka berharap perhatian seperti ini bisa terus dilakukan, terutama bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan. **(dik/vga)**

Scanned with CamScanner

RADAR SIDOARJO.ID

INFO MEDIA PERS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Petani Desa Pertapan Maduretno Terima Combine Harvester dari Kementerian Pertanian

TAMAN-Harapan petani Desa Pertapan Maduretno, Kecamatan Taman, untuk meningkatkan hasil panen akhirnya terwujud. Pada Selasa (20/5), Wakil Bupati Sidoarjo, Mimik Idayana, secara simbolis menyerahkan bantuan alat mesin pertanian (alsintan) berupa combine harvester kepada Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Gotong Royong.

Bantuan tersebut merupakan program dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia, dan Desa Pertapan Maduretno menjadi satu-satunya desa di Kabupaten Sidoarjo yang menerima bantuan unit combine harvester tahun ini.

Kepala Desa Pertapan Maduretno, H. Heru Sutiyo, SE, menyampaikan rasa syukurnya atas bantuan tersebut. Ia mengaku pengajuan proposal dilakukan kurang dari satu bulan lalu melalui DPD Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Sidoarjo.

"Realisasi bantuan ini sangat cepat. Belum sampai satu bulan sejak diajukan, combine harvester langsung diterima," ungkap Heru.

DIKY SANSIRI/RADAR SIDOARJO

PENYERAHAN: Kades Pertapan Maduretno, Heru Sutiyo (tiga dari kiri) bersama Wabup Sidoarjo Mimik, Selasa (20/5).

Menurutnya, keberhasilan ini berkat sinergi antara pemerintah desa, Gapoktan, dan DPD Tani Merdeka Indonesia. Ia berharap, bantuan ini menjadi awal dari kemajuan sektor pertanian di desanya.

"Mudah-mudahan hasil panen meningkat, biaya panen bisa ditekan, dan petani makin sejahtera," tambahnya.

Desa Pertapan Maduretno memiliki lahan pertanian seluas 77 hektare yang dikelola oleh lima kelompok tani. Sebelumnya, desa ini telah memiliki satu unit combine harvester kecil, namun dinilai tidak cukup untuk menunjang efisiensi panen di seluruh lahan.**(dik/vga)**

Scanned with CamScanner

RADAR SIDOARJO.ID

RUMAH POLITIK

12 RABU, 21 MEI 2025 | SURYA

SURYA/DINTA

KUNJUNGAN - Ketua PC GP Ansor Sidoarjo Choirul Mu'minin bersama jajaran foto bersama tim redaksi di sela kunjungan ke Kantor *Tribun Jatim Network* dan Harian *Surya* di kawasan Rungkut Industri III Surabaya, Selasa (20/5).

Ansor Sidoarjo Buka Kolaborasi

SURABAYA, SURYA - Suasana hangat dan akrab terlihat saat rombongan Pimpinan Cabang (PC) Gerakan Pemuda (GP) Ansor Sidoarjo berkunjung ke Kantor Harian *Surya* dan *Tribun Jatim Network*, Selasa (20/5). Bertempat di Ruang Tunjungan, rombongan yang dipimpin Ketua PC GP Ansor Sidoarjo Choirul Mu'minin itu mengajak *Tribun Jatim Network* dan Harian *Surya* untuk [illegible] yang akan dilaksanakan ke depan.

"Kita punya banyak program yang bisa dikolaborasikan baik dalam hal digital, UMKM maupun ketahanan pangan dan saya yakin hal-hal baik yang bisa dikolaborasikan [illegible] dalam waktu dekat ini.

Ajakan tersebut mendapat sambutan hangat dan apresiasi dari Pemred *Tribun Jatim Network* Tri Mulyono dan GM Business Harian *Surya* dan *Tribun Jatim Network* Rachmad Adi Widodo. [illegible] yang juga harus mendapat support dengan baik. Pada intinya kami siap berkolaborasi," tegas Tri Mulyono.**(ren)**

Diperbanyak oleh Subbag Persidangan, Risalah dan Humas Sekretariat DPRD Sidoarjo

INFO MEDIA PERS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Gubernur Pastikan Gelar Pemutihan Pajak Kendaraan

Dua Gelombang di Tahun 2025

SURABAYA, SURYA - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, memastikan Pemprov Jatim akan menggelar program pemutihan pajak kendaraan bermotor.

Yang paling dekat, program pemutihan pajak kendaraan bermotor akan dilaksanakan pada Juli 2025 mendatang. Selain itu juga akan digelar kembali bulan Oktober 2025.

Dikatakan Khofifah, pemutihan pajak kendaraan bermotor rutin digelar Pemprov Jatim dalam memperingati dua momentum penting.

Gelombang pertama digelar dalam rangka HUT Republik Indonesia dan yang kedua digelar dalam rangka HUT Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kecuali saat pandemi covid-19, program pemutihan pajak digelar lebih dari dua kali untuk meningkat-

SURYA/FATIMATUZ ZAHROH

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

motor (BBNKB) untuk kendaraan bermotor atas penyerahan kedua dan seterusnya (BBN II), Bebas sanksi administratif untuk keterlambatan PKB dan BBNKB, Penghapusan PKB progresif dan juga Bebas denda SWDKLLJ untuk tahun lewat.

Di sisi lain, Sekdaprov Jawa Timur Adhy Karyono menegaskan tingkat ketaatan warga Jatim dalam membayar kendaraan bermotor sudah 85 persen. "Ini harus kita apresiasi tingkat kepatuhan warga Jatim dalam membayar pajak kendaraan bermotor adalag 85 persen lebih. Ini harus kita apresiasi," tegasnya.

"Memang sulit ya untuk bisa seratus persen. Bahkan tidak bisa. Karena ada kendaraan yang misalnya sudah bertahun-tahun tidak disuratkan karena memang untuk operasional di sawah misalnya," tegasnya.

Dengan tingkat kepatuhan yang tinggi, Pemprov Jatim juga memberikan reward bagi wajib pajak taat. Gubernur Khofifah memberikan reward berupa umrah ke tanah suci. **(fz)**

BUMN UNTUK INDONESIA BRI

kan daya dukung ekonomi masyarakat.

"Iya. Ada pemutihan pajak administrasi. Jadi pemutihan administrasi itu kan nanti saat Kemerdekaan biasanya bulan Juli, Agustus, September. Itu masuk tahap pertama," tegas Khofifah, Selasa (20/5).

"Kemudian dalam rangka hari jadi Provinsi Jawa Timur yakni Oktober, November, Desember itu masuk di tahap kedua," lanjutnya.

Diketahui, terakhir kali Pemprov Jatim menggelar pemutihan pajak administrasi kendaraan bermotor pada Oktober tahun 2024. Program pemutihan ini mencakup pembebasan sanksi administratif untuk beberapa kategori. Yakni Bebas Bea Balik Nama Kendaraan Ber-

SURYA

Sengketa Parkir Sidoarjo, PT ISS Hanya Setor Rp 6,6 M ke Dishub Sidoarjo sejak 2022

21 Mei 2025 06:09

Fathur Roziq, Fathur Roziq
Redaksi Ketik.co.id

Suasana sidang gugatan PT ISS-KSO terhadap Dishub Sidoarjo di Pengadilan Negeri Sidoarjo pada Selasa (20 Mei 2025). Terlihat Kepala Dishub Sidoarjo Benny Airlangga dan para Pengacara Negara dari Kejaksaan Negeri Sidoarjo. (Foto: Fathur Roziq/Ketik.co.id)

Politik & Pemerintahan

Aa AA

KETIK, SIDOARJO – Harapan Pemkab Sidoarjo untuk memperoleh pendapatan asli daerah (PAD) dari pengelolaan parkir di tepi jalan umum masih minim. Sejak kerja sama ditandatangani pada Juni 2022, PAD yang masuk cuma Rp 6,6 miliar. PT ISS-KSO belum membayar lagi sejak 2024 hingga 2025. Dishub Sidoarjo malah digugat ke pengadilan.

Minimnya pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor parkir itu terungkap dalam sidang lanjutan antara PT Indonesia Sarana Servis-Kerja Sama Operasi (PT ISS-KSO) melawan Dinas Perhubungan (Dishub) Sidoarjo. Sidang lanjutan berlangsung di Pengadilan Negeri Sidoarjo pada Selasa (20 Mei 2025).

Sidang hari itu menghadirkan saksi dari pihak Dishub Sidoarjo. Dia adalah Ketua Paguyuban Juru Parkir (Jukir) Sidoarjo Mukhamad Kholid Muhaimin (Cak Imin). Dia memberikan keterangan tentang berbagai hal terkait sengketa parkir PT ISS versus Dishub Sidoarjo.

Cak Imin menyebutkan, PT ISS tidak memenuhi kewajibannya menyetor pendapatan hasil kerja sama pengelolaan parkir kepada Dishub Sidoarjo. Ketika ditanya oleh majelis hakim, Cak Imin mengungkapkan fakta. Bahwa sejak adanya kerja pengelolaan parkir pada Juni 2022, PT ISS-KSO cuma menyetor satu kali.

Kepada majelis hakim, Cak Imin menjelaskan bahwa dalam kerja sama awal pengelolaan parkir, PT ISS diwajibkan setor Rp 32 miliar. Itu sesuai dengan lelang yang dimenangkan. Namun, dalam perjalanan, terjadi masalah pengelolaan. Termasuk, gugatan hukum. PT PSS baru menyetor setelah ada adendum pada Desember 2023 itu.

Nilainya Rp 6,6 miliar. Itu pun setelah ada kesepakatan adendum pada Desember 2023. Sebelumnya malah tidak ada pembayaran sama sekali. Cak Imin mengaku tidak tahu alasan detail alasan mengapa PT ISS tidak memenuhi kewajibannya. Informasi tentang itu diketahui dari pemberitaan media dan cerita juru parkir.

"Jadi, selama sekitar 1,5 tahun, sepengetahuan saya yang disetor hanya itu," kata Cak Imin dalam persidangan.

Pada 2024, setoran PAD dari kerja sama parkir ini pun tidak ada sama sekali. Dishub Sidoarjo pun menagih uang parkir itu ke PT ISS. Dishub Sidoarjo juga meminta PT ISS menyerahkan titik-titik parkir ke Dishub Sidoarjo. Dikembalikan saja ke Pemkab Sidoarjo.

Namun, PT ISS memilih menggugat Dishub Sidoarjo ke Pengadilan Negeri (PN) Sidoarjo. Sengketa gugatan itu disidangkan sejak Januari 2025 hingga saat ini. Jadi, selama 2024 hingga 2025, belum ada setoran masuk sama sekali.

Baca Juga:
Dishub Sidoarjo Ditarget Rp 25 Miliar, Sengketa Parkir vs PT ISS Belum Kelar

Nah, dalam kesaksiannya, Cak Imin mengungkap fakta lanjutan. Sebagian juru parkir di lapangan memilih menolak setor ke PT ISS. Mereka ternyata tahu bahwa PT ISS tidak memenuhi kewajibannya menyetor pendapatan parkir ke Dishub Sidoarjo.

"Rekan-rekan jukir di paguyuban, setelah saya kabari perihal PT ISS tidak setor ke dishub, beberapa dari mereka memutuskan untuk tidak menyetor ke PT ISS. Tapi, itu terhitung piutang untuk mereka," lanjutnya.

Pihak PT PSS dalam sidang menyatakan bahwa sejak kontrak kerja sama ditandatangani pada Juni 2022, PT ISS tidak bisa langsung bekerja. Baru persiapan dan sosialisasi-sosialisasi. Tahun pertama tidak ada pemasukan.

Majelis hakim sidang gugatan PT ISS-KSO terhadap Dishub Sidoarjo di Pengadilan Negeri Sidoarjo pada Selasa (20 Mei 2025). Terlihat para pengacara dari PT ISS. (Foto: Fathur Roziq/Ketik.co.id)

Saat dikonfirmasi wartawan, Direktur PT ISS Dian Sutjipto mengatakan pihaknya sudah secara aktif mengirimkan surat sejak Februari 2024 untuk membicarakan penyetoran dana. Namun, tidak mendapat tanggapan substansial dari Dishub Sidoarjo.

"Kami setiap bulan sejak Februari 2024 selalu mengirim surat ke dishub dan ditembuskan ke berbagai instansi terkait, untuk menyampaikan niat menyetor sesuai pendapatan riil yang kami kumpulkan. Namun, esensi dari surat-surat kami tidak pernah ditanggapi," jelas Dian Sutjipto.

Menurut Dian, pendapatan yang diperoleh PT ISS di lapangan jauh dari ekspektasi seperti dalam perjanjian. Karena banyak kewajiban dari pihak Dishub Sidoarjo yang tidak dipenuhi. Hal ini menghambat operasional mereka.

"Kewajiban dari dishub yang tidak dijalankan sangat berdampak pada pelaksanaan kami di lapangan. Jadi, jelas terlihat, siapa yang menahan dan menghambat jalannya kerja sama ini," tambah Dian.

Benarkah ada jukir yang tidak membayar? Dian Sutjipto menyatakan pihaknya memiliki data lengkap mengenai mitra jukir. Termasuk, tunggakan dan alasan mereka menolak menyetor. Semua dicatat sebagai piutang setoran yang akan ditindaklanjuti secara hukum.

Baca Juga:
Sengketa Parkir di Sidoarjo, Komisi B DPRD Sidoarjo Sebut Dua Kemungkinan untuk Dishub Sidoarjo

"Data kami mencatat semua jukir yang masih menunggak. Ini akan kami proses hukum karena piutang setoran tersebut adalah bagian dari pendapatan daerah," tegasnya.

Suasana sidang juga diwarnai pertanyaan-pertanyaan lucu majelis hakim. Hakim menyebut saksi sering disapa Cak Imin. Karena itu, saksi ditanya-tanya terkait panggilannya (Cak Imin) yang mirip Ketua Umum DPP PKB Dr Abdul Muhaimin Iskandar.

"Apakah Anda kenal Presiden?"

"Tidak, Pak Hakim," jawab Cak Imin.

"Apakah Anda kenal Gubernur?"

INFO MEDIA PERS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Sidang PT ISS vs Dishub Sidoarjo, Saksi Beberkan Dugaan Wanprestasi dan Mogok Setor Jukir

bidik • 2 menit ago

0 62 2 minutes read

Persidangan antara PT ISS selaku Pemohon, melawan Dishub Sidoarjo sebagai Termohon. (Foto: Teddy/Bidiknasional.com)

SIDOARJO, BIDIKNASIONAL.com – Persidangan sengketa antara PT Indonesia Sarana Service (PT ISS) selaku Pemohon, melawan Dinas Perhubungan (Dishub) Sidoarjo sebagai Termohon kembali digelar di Pengadilan Negeri Sidoarjo, Selasa (20/5/2025). Agenda kali ini adalah pemeriksaan saksi dari pihak Termohon.

Dalam sidang tersebut, pihak Termohon menghadirkan satu saksi yakni Ketua Paguyuban Juru Parkir (Jukir) Sidoarjo, Mukhamad Kholid Muhaimin, yang akrab disapa Cak Imin. Ia memberikan keterangan mengenai polemik pengelolaan dan setoran parkir oleh PT ISS.

Cak Imin menyebutkan bahwa PT ISS tidak menjalankan kewajibannya untuk menyetor hasil kerja sama pengelolaan parkir kepada Dishub Sidoarjo. Ia merujuk pada addendum perjanjian yang ditandatangani pada Desember 2023, di mana PT ISS disebut berkewajiban menyetor sebesar Rp6,6 miliar.

"Untuk alasan detail mengapa tidak dibayar, saya tidak tahu Yang Mulia. Saya mengetahui dari beberapa pemberitaan media bahwa PT ISS belum menyetorkan dana parkir ke Dishub sebesar Rp6,6 miliar," ujar Cak Imin dalam persidangan.

Kabar mangkirnya PT ISS dari kewajiban penyetoran tersebut, lanjut Cak Imin, memicu reaksi dari para jukir. Beberapa juru parkir di bawah koordinasinya memutuskan untuk mogok menyetorkan dana ke PT ISS, karena mempertanyakan ke mana aliran uang parkir yang seharusnya disetor ke Dishub.

"Rekan-rekan jukir di paguyuban saya, setelah saya kabari perihal PT ISS tidak setor ke Dishub, beberapa dari mereka memutuskan untuk tidak menyetor ke PT ISS. Meski terhitung piutang untuk mereka," lanjutnya.

Dalam persidangan, Cak Imin juga membeberkan bahwa dalam addendum Desember 2023, PT ISS hanya mengelola 87 titik parkir dengan kewajiban menyetor Rp6,6 miliar. Angka tersebut menyusut drastis dari perjanjian kerja sama (PKS) awal, tertanggal 25 April 2022, yang mencakup 359 titik parkir dengan kewajiban menyetor Rp32 miliar.

"Pada tahun pertama perjanjian, ada setoran dari PT ISS ke Dishub, meski nominalnya tidak sesuai. Tapi, yang saya tahu, di perjanjian kedua dan ketiga, selama 1 tahun 6 bulan ini belum ada setoran dari PT ISS," ungkap Cak Imin.

BACA SEBELUMNYA: KEHILANGAN MOTOR DI PARKIRAN SIDOARJO, PT ISS LEPAS TANGAN, JUKIR GANTI RUGI

Ketua Paguyuban Jukir Sidoarjo, Mukhamad Kholid Muhaimin saat menjadi saksi. (Foto: Teddy/BN.com)

Pernyataan saksi tersebut menjadi sorotan dalam persidangan, mengingat Dishub Sidoarjo menuding PT ISS melakukan wanprestasi atas kewajiban mereka dalam kerja sama pengelolaan parkir. Sementara itu, PT ISS memiliki versi berbeda atas persoalan ini.

Dihubungi terpisah, Direktur PT ISS Dian Sutjipto memberikan tanggapan terkait tuduhan tidak menyetor hasil pengelolaan parkir kepada Dishub.

Menurutnya, pihaknya sudah secara aktif mengirimkan surat sejak Februari 2024 untuk membicarakan penyetoran dana, namun tidak mendapat tanggapan substansial dari Dishub.

"Kami setiap bulan sejak Februari 2024 selalu mengirim surat ke Dishub dan ditembuskan ke berbagai instansi terkait, untuk menyampaikan niat menyetor sesuai pendapatan riil yang kami kumpulkan. Namun esensi dari surat-surat kami tidak pernah ditanggapi," jelas Dian.

Dian menilai bahwa pendapatan yang diterima PT ISS di lapangan jauh dari ekspektasi dalam perjanjian karena banyak kewajiban dari pihak Dishub yang tidak dipenuhi. Hal ini, menurutnya, sangat menghambat operasional mereka.

"Kewajiban dari Dishub yang tidak dijalankan sangat berdampak pada pelaksanaan kami di lapangan. Jadi jelas terlihat, siapa yang menahan dan menghambat jalannya kerja sama ini," tambah Dian.

Terkait mogok setoran oleh juru parkir, Dian menyatakan bahwa pihaknya memiliki data lengkap mengenai mitra jukir, termasuk tunggakan dan alasan mereka menolak menyetor. Semua itu telah dicatat sebagai piutang setoran yang akan ditindaklanjuti secara hukum.

"Data kami mencatat semua jukir yang masih menunggak. Ini akan kami proses hukum karena piutang setoran tersebut adalah bagian dari pendapatan daerah," tegasnya.

Ia juga mempertanyakan relevansi kehadiran Ketua Paguyuban dalam persidangan yang membahas setoran resmi ke Dishub. Menurutnya, kesaksian tersebut terkesan dipaksakan untuk melegitimasi peran paguyuban dalam mengelola jukir yang justru selama ini tidak menyetor.

"Kehadiran saksi dari paguyuban jukir agak mengherankan. Apa korelasinya dengan setoran resmi PT ISS ke Dishub? Tapi setidaknya ini membuktikan bahwa pihaknya turut mengelola jukir yang menolak menyetor," tutupnya.

Laporan : Teddy Syah Roni

NEWS

Dibagikan Wabup, Belasan Kelompok Tani di Sidoarjo Terima Bantuan 15 Hand Traktor dan 1 Alsintan

Republikjatim.Com
Selasa, 20 Mei 2025 17:0 WIB

REPUBLIKJATIM
Cepat. Akurat. Tajam. Faktual dan Terpercaya

INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Sidoarjo (republikjatim.com) - Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) yang ada di Kabupaten Sidoarjo memperoleh bantuan 15 hand traktor dari Kementerian Pertanian RI. Selain itu, ada Gapoktan Desa Pertapan Maduretno, Kecamatan Taman, Sidoarjo yang menerima bantuan 1 unit Alsintan (Combine Harvester).

Bantuan itu diserahkan Wakil Bupati Sidoarjo, Mimik Idayana kepada 15 Gapoktan, Selasa (20/05/2025) di Dinas Pangan dan Pertanian Pemkab Sidoarjo. Sedangkan penyerahan 1 Alsintan di Balai Desa Pertapan Maduretno, Kecamatan Taman, Sidoarjo.

Rabu, 21 Mei 2025 07:05 WIB

Puncak Kemeriahan HAKIN 2025 di Alun-Alun Sidoarjo, Keterbukaan Informasi Kolaboratif Satukan Masyarakat

Bantuan itu merupakan program Kementrian Pertanian atas aspirasi Dewan Pengurus Daerah (DPD) Tani Merdeka Indonesia (TMI) kepada Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025.

Wabup Sidoarjo, Mimik Idayana meminta 15 Gapoktan penerima bantuan untuk memanfaatkannya secara baik. Menurutnya, bantuan alat dan mesin pertanian menjadi bagian dari program ketahanan pangan yang digaungkan Presiden Prabowo. Ia berharap dengan bantuan ini dapat meningkatkan produktivitas pertanian.

"Manfaatkan hand traktor ini dengan baik," ujar Wabup Sidoarjo, Mimik Idayana kepada para penerima bantuan.

Selain itu, Mimik juga meminta para petani untuk tetap mempertahankan lahan pertaniannya. Pihaknya mengingatkan jangan sampai lahan pertanian dijual untuk dialihfungsikan menjadi perumahan atau perusahaan.

"Kami berharap lahan pertanian dapat dikelola dengan maksimal agar para petani Sidoarjo ikut berkontribusi dalam program ketahanan pangan. Petani harus tetap semangat mempertahankan pertanian," pintanya.

RADAR SIDOARJO.ID

Selasa, 20 Mei 2025 03:53 WIB

Peringati Harkitnas 2025, Wabup Sidoarjo Ajak Bangkit Bersama Wujudkan Indonesia Lebih Kuat

Mimik Idayana yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Penasehat DPD TMI Kabupaten Sidoarjo menegaskan bantuan Alsintan ini ke depannya bisa dipergunakan dengan sebaik mungkin. Bahkan, harus bijaksana untuk produktivitas pertanian di 77 hektar lahan pertanian di Gapoktan Desa Pertapan Maduretno, Kecamatan Taman, Sidoarjo.

REPUBLIKJATIM
Cepat. Akurat. Tajam. Faktual dan Terpercaya

INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

"Alhamdulillah Desa Pertapan Maduretno mendapat bantuan Combine Harvester untuk merawat lahan pertanian. Nanti alat ini bisa dipergunakan dengan bergantian oleh 4 Gapoktan di Desa Pertapan Maduretno yang merawat 77 hektar sawah. Semoga alat ini bisa membantu efektifitas produksi pertanian," tegas Mimik Idayana di Balai Desa Pertapan Maduretno.

Dalam kesempatan itu, Mimik juga meminta para petani Sidoarjo untuk memanfaatkan Kredit Usaha Rakyat Daerah (Kurda) sebagai modal pertanian. Kurda merupakan bantuan permodalan berbunga rendah milik bank Sidoarjo BPR Delta Artha Perseroda. Bunganya 2 persen pertahun yang khusus diberikan kepada pelaku UMKM dan pelaku usaha produktif bidang pertanian dan perikanan.

"Ada bantuan modal Kurda. Panjenengan butuh modal bisa memanfaatkan Kurda ini, karena bunganya sedikit," ungkap Ketua DPC Partai Gerindra Sidoarjo ini.

Selasa, 20 Mei 2025 08:02 WIB

Wabup Sidoarjo ke Gubuk Tak Layak Huni di Ketapang Tanggulangin, Siapkan Kos dan Tanggung Biaya Hidup Mbah Tasriban

Sementara Khoiri salah seorang petani asal Kelurahan Urangagung, Kecamatan Sidoarjo mengakui bantuan itu sangat membantunya dalam mengelola lahan pertaniannya. Keberadaan hand traktor akan meningkatkan efisiensi dalam mengelola lahan pertanian. Selain itu, dapat mengurangi biaya produksi dalam proses bercocok tanam.

"Karena selama ini kebutuhan hand traktor saat menggarap sawah diperolehnya dari menyewa. Sebenarnya kita punya hand traktor tetapi rusak. Terpaksa kita sewa dari desa lain, termasuk sewa operatornya," urainya.

Khoiri meyakinkan menjadi petani cukup menjanjikan sebagai mata pencaharian. Bahkan, dari bertani Khoiri sudah dapat menabung buat biaya haji dan membeli rumah. Ia mengaku lahan persawahan yang dikelolanya bukan miliknya sendiri. Namun, lahan seluas 1 hektar yang dikelolanya ini dapat menghasilkan produksi pertanian yang menguntungkan. Apalagi didukung dengan alat dan mesin pertanian yang diberikan pemerintah.

"Ketersediaan pupuk dan obat-obatan untuk pertanian saat ini mudah diperoleh. Alhamdulillah pupuk sekarang sudah lancar dan obat-obatan pertanian juga selalu tercukupi," pungkasnya. Ary/Waw

Editor : Redaksi

Diperbanyak oleh Subbag Persidangan, Risalah dan Humas Sekretariat DPRD Sidoarjo